

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan itu maka, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

Diberlakukannya reformasi keuangan daerah, selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang

dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang harus ada dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tujuan dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah agar pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyajikan keuangan yang standar, bagaimana perlakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi.

## **2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005:12).

Menurut Mahmudi (2010:1) menjelaskan laporan keuangan adalah pertanggungjawaban dari suatu intitusi untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:159) mendefinisikan akuntansi dan laporan keuangan adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan guna menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan selama satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun pelaporan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut yaitu saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

#### 5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

#### 6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas penerimaan dan pengeluaran kas.

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan pengujian laporan keuangan secara wajar.

## **2.3 Laporan Arus Kas**

### **2.3.1 Pengertian Laporan Arus Kas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP), menjelaskan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Menurut Bastian (2006: 380), laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, dimana dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari tiga sisi, yaitu aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.

Menurut Mursyidi (2009:80), laporan arus kas merupakan laporan yang disusun secara sistematis untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran melalui kas umum Negara/kas Daerah selama periode tertentu.

Menurut Halim (2007:96), laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas termasuk setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan ini menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi tahun berkenaan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaaan, dan non anggaran (transitoris).

Dari pengertian laporan arus kas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi tentang arus masuk kas dan arus keluar kas sehingga dapat diketahui perubahan arus kas selama satu periode, dimana terdapat empat komponen aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan transitoris.

### **2.3.2 Tujuan Laporan Arus Kas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Sedangkan Menurut Bastian (2001:141) tujuan utama laporan arus kas adalah :

1. Mengidentifikasi sumber arus kas masuk, pos pengeluaran kas selama periode pelaporan, dan saldo kas pada tanggal pelaporan.
2. Memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi.

### **2.3.3 Manfaat Laporan Arus Kas**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa manfaat informasi arus kas yaitu:

1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus masuk kas dan arus keluar kas selama periode pelaporan.
3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu

entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Mahmudi (2006:185) menjelaskan bahwa laporan arus kas memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya surplus atau defisit anggaran.
2. Untuk memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah di masa datang.
3. Untuk memprediksi kesinambungan fiskal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan politik.

#### **2.3.4 Entitas Laporan Arus Kas**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa entitas pelaporan arus kas adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri:

- a) Pemerintah pusat
- b) Pemerintah daerah, dan
- c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perendaharaan adalah unit yang

ditetapkan sebagai bendaharawan umum Negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum Negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban membuat laporan arus kas adalah entitas pelaporan, sedangkan entitas akuntansi yaitu masing-masing SKPD yang ada dipemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan arus kas.

### **2.3.5 Penyajian Laporan Arus Kas**

Mursyidi (2009:83) menjelaskan bentuk dan struktur laporan arus kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian laporan arus kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai aktivitas yang disajikan diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian didahului dengan arus kas masuk dan arus kas keluar berbagai aktivitas, kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas. Struktur laporan arus kas terdiri dari arus masuk dan arus keluar kas berbagai aktivitas. Arus kas masuk adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah, sedangkan arus kas keluar adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. Dari arus masuk kas dan arus keluar kas setiap aktivitas akan diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas. Arus kas bersih setiap aktivitas dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas. Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi penurunan kas. Kenaikan

atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo akhir sehingga diperoleh saldo akhir.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasian arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang dimaksud dengan akun-akun

pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam laporan arus kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### 1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a) Penerimaan Perpajakan
- b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c) Penerimaan Hibah
- d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan Negara/daerah dan Investasi  
Lainnya
- e) Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa
- f) Transfer masuk.

Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a) Pembayaran Pegawai
- b) Pembayaran Barang

- c) Pembayaran Bunga
- d) Pembayaran Subsidi
- e) Pembayaran Hibah
- f) Pembayaran Bantuan Sosial
- g) Pembayaran Lain-lain/kejadian luar biasa
- h) Pembayaran Transfer.

Jika suatu entitas pelaporan surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber-sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Penjualan Aset Tetap
- b) Penjualan Aset Lainnya
- c) Pencairan Dana Cadangan
- d) Penerimaan dari Divestasi
- e) Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Perolehan Aset Tetap
- b) Perolehan Aset Lainnya
- c) Pembentukan Dana Cadangan
- d) Penyertaan Modal Pemerintah
- e) Pembelian Investasi Dalam Bentuk Sekuritas.

### 3. Aktivitas Pendanaan.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Penerimaan Utang Luar Negeri
- b) Penerimaan dari Utang Obligasi

- c) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah
- d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang
- b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi
- c) Pengeluaran Kas Untuk Dipinjamkan Kepada Pemerintah Daerah
- d) Pengeluaran Kas Untuk Dipinjamkan Kepada Perusahaan Negara.

#### 4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasikan kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris meliputi:

- a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b) Kiriman Uang Masuk

- c) Penerimaan kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris meliputi:

- a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b) Kiriman Uang Keluar
- c) Pemberian Uang Persediaan Dari Bendahara Pengeluaran.

### **2.3.6 Pelaporan Arus Kas**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

- a) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- b) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan, dan
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

### **2.3.7 Analisis Laporan Arus Kas**

Menurut Mahmudi (2006:193), laporan arus kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen maupun pengguna laporan eksternal, misalnya investor, kreditor, donor, dan masyarakat. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Untuk itu perlu dilakukan analisis laporan arus kas agar dapat memberikan informasi yang lebih bermakna, terutama untuk dapat mengetahui sumber dan penggunaan kas serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan/penurunan kas bersih pada periode tertentu. Selain itu, dengan adanya analisis ini akan membantu pihak Pemerintah dalam menilai apakah kebijakan yang ditetapkan telah berjalan

dengan baik dalam memperoleh serta menggunakan kas tersebut dalam suatu periode.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis laporan arus kas adalah proses menganalisa laporan arus kas pada setiap komponen aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris guna memperoleh informasi yang lebih bermakna untuk melihat posisi keuangan pemerintah pada akhir periode.

Menurut Mahmudi (2006:193), terdapat beberapa teknik atau cara untuk melakukan analisis Laporan Arus Kas, yaitu:

#### 1. Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Menurut Mahmudi (2006:194), analisis pertumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing-masing aktivitas selama beberapa tahun. Pertumbuhan arus kas ini dapat digunakan untuk:

- a. Menilai bagus tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah.
- b. Menilai, mengevaluasi, dan memproyeksi arah kebijakan keuangan daerah.
- c. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan.

Pertumbuhan dari setiap komponen laporan arus kas dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Tahun } t = \frac{\text{Arus Kas Tahun } t - \text{Arus Kas Tahun } t-1}{\text{Arus Kas Tahun } t-1} \times 100 \%$$

Dimana:

- Arus kas tahun  $t$  adalah besar arus kas bersih pada tahun bersangkutan
- Arus kas tahun  $t-1$  adalah besar arus kas bersih pada tahun sebelumnya

a. Pertumbuhan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

- Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang bersaldo positif dan tumbuh meningkat dari tahun ke tahun memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian dan yang semakin besar dalam membiayai kegiatan operasional rutinnnya. Dimana peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi menandakan pertumbuhan dari arus kas masuk aktivitas operasi yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar aktivitas operasi.
- Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang bersaldo negatif dan tumbuh menurun dari tahun ke tahun memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin buruk, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang semakin kecil dalam membiayai kegiatan operasioal rutinnnya. Dimana penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi menandakan pertumbuhan dari arus kas masuk kas aktivitas operasi yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar aktivitas operasi.

b. Pertumbuhan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

- Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bersaldo positif dan tumbuh meningkat dari tahun ke tahun memberikan sinyal kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin buruk, karena menunjukkan adanya pertumbuhan aset tetap yang semakin menurun. Dimana peningkatan arus kas bersih dari aktivitas investasi menandakan pertumbuhan arus kas masuk aktivitas investasi yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar aktivitas investasi.
- Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif dan tumbuh menurun dari tahun ke tahun memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik, karena menunjukkan adanya pertumbuhan aset tetap yang semakin meningkat. Dimana peningkatan arus kas bersih dari aktivitas investasi menandakan pertumbuhan arus kas masuk aktivitas investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar aktivitas investasi.

c. Pertumbuhan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

- Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang bersaldo positif dan tumbuh meningkat menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penerimaan pendanaan yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran pendanaan. Arus kas bersih yang meningkat memberikan sinyal kinerja keuangan yang baik apabila

pemerintah mengalami defisit anggaran. Sedangkan yang buruk apabila pemerintah mengalami surplus anggaran.

- Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang bersaldo negatif dan tumbuh menurun menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penerimaan pendanaan yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran pendanaan. Arus kas bersih yang menurun memberikan sinyal kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah mengalami surplus anggaran. Sedangkan arus kas bersih yang menurun memberikan sinyal kinerja keuangan yang buruk apabila pemerintah mengalami defisit anggaran.

d. Pertumbuhan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris yang bersaldo positif dan tumbuh meningkat dari tahun ke tahun memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin buruk, karena menunjukkan adanya pertumbuhan utang PFK yang lebih besar. Dimana peningkatan arus kas bersih dari aktivitas transitoris menandakan pertumbuhan arus kas masuk aktivitas transitoris yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar aktivitas transitoris.
- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris yang bersaldo negatif dan tumbuh menurun dari tahun ke tahun memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik, karena menunjukkan adanya pertumbuhan utang PFK yang lebih kecil.

Dimana penurunan arus kas bersih dari aktivitas transitoris menandakan pertumbuhan arus kas masuk aktivitas transitoris yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar aktivitas transitoris.

## 2. Analisis Arus Kas Untuk Setiap Komponen

### a. Analisis arus kas dari aktivitas operasi

- Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang bersaldo positif memberikan indikasi bahwa kinerja keuangan pemerintah yang baik, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnnya.
- Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang bersaldo negatif memberikan indikasi adanya kinerja keuangan pemerintah yang buruk, karena menunjukkan adanya kesulitan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan operasional rutinnnya.

### b. Analisis arus kas dari aktivitas investasi

- Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kinerja keuangan yang buruk, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan kegiatan penambahan aset tetap.
- Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif memberikan indikasi adanya kinerja keuangan yang baik, karena

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan kegiatan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap.

c. Analisis arus kas dari aktivitas pendanaan

- Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kinerja keuangan yang baik, apabila pemerintah mengalami defisit anggaran. Sedangkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang bersaldo positif menunjukkan kinerja keuangan yang buruk, apabila pemerintah mengalami surplus anggaran.
- Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang bersaldo negatif memberikan indikasi adanya kinerja keuangan yang baik, apabila pemerintah mengalami surplus anggaran. Sedangkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yang bersaldo negatif menunjukkan kinerja keuangan yang buruk, apabila pemerintah mengalami defisit anggaran.

d. Analisis arus kas dari aktivitas transitoris

- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris yang bersaldo positif menandakan adanya penerimaan PFK yang lebih besar dari pada pengeluaran PFK, dengan begitu titipan atau hutang PFK pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang semakin memburuk.

- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris yang bersaldo negatif menandakan adanya penerimaan PFK yang lebih kecil dari pada pengeluaran PFK, dengan begitu titipan atau hutang PFK pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang semakin membaik.

### 3. Analisis Arus Kas Bebas

Pemerintah daerah dengan kinerja keuangannya yang baik memiliki arus kas bebas yang positif, yang berarti pemerintah daerah memiliki kelebihan kas yang dapat digunakan untuk menambah dana cadangan, melunasi utang daerah, atau melakukan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal. Sedangkan pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang buruk memiliki arus kas bebas yang negatif, yang berarti pemerintah daerah memiliki kekurangan kas sehingga dibutuhkan penerimaan pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut. Menurut Mahmudi (2006:197) untuk menghitung arus kas bebas digunakan rumus:

$$\text{Arus Kas Bebas} = \text{Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi} - \text{Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (Belanja Modal)}$$

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Hedi Pandowo dan Ahmad Kudhori (2017)	Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Kota Madiun)	Kesimpulan yang bisa dibuat adalah: 1).Arus kas dari aktivitas operasi bersaldo positif dan secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2012-2015, walaupun di tahun 2016 mengalami penurunan namun masih bersaldo positif 2).Arus kas dari aktivitas investasi bersaldo negatif dari tahun 2012-2016 3).Arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2012 dan 2015 bersaldo negatif. 4).Perhitungan arus kas bebas menunjukkan saldo positif dari tahun 2012-2015.
Oktaviana Dwisari Steptapusma (2017)	Analisis Laporan Arus Kas (Studi Kasus di Koperasi Kredit CU lantang Tipo Tahun 2014-2016)	Berdasarkan hasil penelitian : 1).Perkembangan arus kas operasi pada tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Kenaikan arus kas operasi menunjukkan bahwa koperasi dalam kondisi baik dalam menghasilkan kas untuk menjalankan aktivitas operasi sedangkan penurunan disebabkan kenaikan pada piutang dan bebab yang masih dibayar. 2).Perkembangan arus kas keluar investasi mengalami kenaikan, yang disebabkan penambahan properti investasi dan pembelian aset tetap. 3).Perkembangan arus kas pendanaan mengalami penurunan karena SHU dialokasikan untuk membayar kewajiban jangka panjang, simpanan pokok dan wajib, dan cadangan umum. 4).Kinerja keuangan arus kas pada tahun 2014-2016 kurang baik karena koperasi tidak mampu membayar kewajiban lancarnya melalui arus kas operasi, kesulitan membiayai pengeluaran modalnya, kuang mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya, tetapi pada tahun 2015 koperasi masih memiliki modal yang cukup untuk investasi dan pembayaran utang

Eka Wahyuningsi (2016)	Analisis Laporan Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan pada PT.PINDAD (Persero) Bandung	Berdasarkan hasil penelitian: 1).Pola yang dihasilkan dari Laporan Arus Kas pada PT.PINDAD (Persero) Bandung mengalami pola yang tidak sehat pada tahun 2014 yaitu adanya pola arus kas operasi negatif, arus kas investasi negatif dan arus kas pendanaan positif. 2).Kendala yang dihadapi adalah adanya piutang yang tidak tertagih dan penyertaan modal negara yang tidak terealisasi yang mengakibatkan perusahaan melakukan pinjaman Bank. 3).Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yaitu mengoptimalkan kegiatan penagihan piutang dengan membentuk tim penagihan dan penyertaan modal negara yang tidak terealisasi adalah dengan melakukan pinjaman dari Bank.
------------------------	---	--

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kabupaten Belu yang dalam hal ini sebagai entitas pelaporan yang terdiri atas lebih dari satu entitas akuntansi yang menurut perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang salah satunya adalah laporan arus kas. Dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Analisis laporan arus kas merupakan salah satu hal penting dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Informasi laporan arus kas

digunakan bagi pengguna laporan suatu pemerintah daerah dalam menilai arus kas untuk pengambilan keputusan dalam penyediaan sumber daya bagi pemerintah daerah. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah pusat atau daerah selama periode pelaporan. Dimana penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah dan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. Kemudian data-data yang diperoleh digunakan sebagai alat untuk memprediksikan posisi keuangan pemerintah dimasa yang akan datang serta menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan pememikiran diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat sumber dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dan penggunaannya selama tahun berjalan serta untuk melihat posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu apakah mengalami kenaikan atau penurunan, dan melalui penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan mengenai laporan arus kas yang dapat digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Belu secara adil, merata dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

